



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**

**LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
2024**

**DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN SIKKA**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada pasal 19 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada Masyarakat pasal 17 ayat (1), LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka sebagai salah satu organisasi perangkat daerah otonom yang melaksanakan kewenangan di bidang perikanan di Kabupaten Sikka melakukan pertanggungjawaban atas semua program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024.

LKPJ ini merupakan bagian dari akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan perubahannya selama kurun waktu satu tahun.

LKPJ Dinas Perikanan Kabupaten Sikka tahun 2024 berisi penjelasan umum organisasi yaitu visi, misi, strategi dan arah kebijakan, tujuan, sasaran, indikator pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan pilihan dengan penekanan kepada program dan kegiatan, sasaran program/kegiatan, realisasi program dan kegiatan, capaian pelaksanaan program dan kegiatan (kinerja) dan permasalahan dan solusi.

Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Harapan kami laporan ini bermanfaat dan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pembangunan bidang perikanan pada masa yang akan datang.

Maumere, 21 Januari 2025

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Sikka,



**PAULUS H. BANGKUR, S.Pi., M.Pi**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660628 199703 1 005



# DAFTAR ISI

	Hal.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	2
1.3. Data Umum Perangkat Daerah .....	4
<b>BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMRINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH</b> .....	<b>9</b>
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	9
2.2. Pelaksanaan Urusan Pilihan .....	17
2.3. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan .....	21
2.4. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2023 .....	22
2.5. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	23
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN</b> .....	<b>24</b>
3.1. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas-Pembantuan .....	24
3.2. Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya penyelesaian .....	24



---

<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>25</b>
4.1.	Kesimpulan .....	25
4.2.	Saran .....	26



## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1. Keadaan Sumber Daya Pegawai Per Bidang .....	6
1.2. Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan .....	7
1.3. Keadaan Pegawai Menurut Jabatan .....	7
1.4. Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin .....	8
1.5. Keadaan Pegawai Menurut Golongan .....	8
2.1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....	10
2.2. Data Produksi Perikanan Kabupaten Sikka .....	17
2.3. Rumah Tangga Perikanan (RTP).....	18
2.4. Jenis Alat Tangkap di Kabupaten Sikka.....	19
2.5. Armada Perikanan di Kabupaten Sikka.....	19
2.6. Data Konsumsi Ikan .....	20
2.7. Data Pendapatan Nelayan .....	20
2.8. Nilai PDRB .....	20
2.9. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD .....	22
2.10. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 .....	23



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada pasal 19 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada Masyarakat pasal 17 ayat (1), LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah otonom yang melaksanakan kewenangan di bidang perikanan di Kabupaten Sikka melakukan pertanggungjawaban atas semua program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD (APBD Induk maupun APBD Perubahan) untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat nelayan, pembudidaya maupun pengolah hasil perikanan.

Dalam penyusunan LKPJ ini memuat tentang pencapaian hasil dari tujuan, sasaran dan indikator pencapaian sasaran Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Perubahan RENSTRA Dinas Perikanan 2024 - 2026 dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan pilihan dengan penekanan kepada program dan kegiatan, sasaran program/kegiatan, realisasi program dan kegiatan, capaian pelaksanaan program dan kegiatan (kinerja) dan permasalahan dan solusi.



## 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perikanan Kabupaten Sikka Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
15. Peraturan Bupati Sikka Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan
16. Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah) Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026;



### 1.3. Data Umum Perangkat Daerah

#### 1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka nomor Peraturan Bupati Sikka nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan sebagai berikut :

a. Kedudukan

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Susunan Organisasi

(1) Dinas Perikanan merupakan Tipe B yang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Perikanan Tangkap
- d. Bidang Pembinaan Mutu dan Perizinan
- e. Bidang Perikanan Budidaya
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bidang Perikanan Tangkap membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional

(4) Bidang Pembinaan Mutu dan Perizinan membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional

(5) Bidang Perikanan Budidaya membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional



c. Tugas

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

d. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Perikanan Kabupaten Sikka mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kerja dinas
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pembinaan mutu dan perizinan serta kelompok fungsional
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya, pembinaan mutu dan perizinan dan kelompok fungsional.
6. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

e. Tata Kerja

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya.



## 2. Sumberdaya Manusia Aparatur

Penggunaan sumberdaya yang diibatkan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan tahun 2024 terdiri dari sumberdaya manusia perikanan yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional dan sumberdaya manusia yang melekat dengan tugas pokok dan fungsi yaitu sekretariat, bidang-bidang teknis dan seksi-seksi sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.

Perinciannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.1. Keadaan Sumber Daya Pegawai Per Bidang

No	BAGIAN	JUMLAH PNS	PPPK
1	Kepala Dinas	1	-
2	Sekretariat	9	-
3	Bidang Perikanan Budidaya	5	1
4	Bidang Perikanan Tangkap	6	2
5	Bidang Pembinaan Mutu & Perijinan	5	2
	JUMLAH	26	5

Dari jumlah pegawai yang ada, dikelompokan sebagai berikut :

### 1. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan

Jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 1.2. Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S.3	-	-
2.	S.2	1	3,22
3.	S.1	22	70,97
4.	D.1	-	-
5.	D.2	-	-
6.	D.3	1	3,22
7.	D.4	-	-
8.	SLTA	5	16,13
9.	SLTP	2	6,45
10.	SD	-	-
Jumlah		<b>31</b>	<b>100</b>

2. Keadaan pegawai menurut jenjang Jabatan

Menurut jabatan, jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural untuk Eselon II, III dan IV sebanyak 6 (enam) orang. Keadaan pegawai menurut jabatan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3. Keadaan Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan / Eselon	Golongan				Jumlah	Ket
		I	II	III	IV		
1.	Struktural :						
	- Eselon I	-	-	-	-	-	
	- Eselon II	-	-	-	1	<b>1</b>	
	- Eselon III	-	-	-	4	<b>4</b>	
	- Eselon IV	-	-	1	-	<b>1</b>	
2.	JFT	-	-	8	-	<b>8</b>	
3.	PPPK	-	-	5	-	<b>5</b>	
4.	Staf	2	4	6	-	<b>12</b>	



5.	Tenaga honorer	-	-	-	-	<b>39</b>	
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>70</b>	

### 3. Keadaan pegawai menurut jenis kelamin

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari 31 orang yaitu 22 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.

Tabel 1.4. Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	22	70,97
2.	Perempuan	9	29,03
<b>Jumlah</b>		<b>31</b>	<b>100</b>

### 4. Keadaan pegawai menurut golongan

Menurut golongan jumlah pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Sikka ditampilkan pada tabel 5.

Tabel 1.5. Keadaan Pegawai Menurut Golongan

No.	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Golongan I	2	6,45
2.	Golongan II	4	12,90
3.	Golongan III	20	64,51
4.	Golongan IV	5	16,12
<b>Jumlah</b>		<b>31</b>	<b>100,00</b>



## **BAB II**

# **HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

### **2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Target pendapatan tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 3.000.000.000 dengan capaian realisasi Rp. 1.215.123.180 atau 40,50%. Sedangkan alokasi anggaran belanja untuk Dinas Perikanan tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 18.212.481.189,98 dengan realisasi mencapai Rp. 16.874.363.321 atau mencapai 92,65% dengan perincian :

#### **1. Belanja Operasi**

Alokasi anggaran belanja operasi tahun anggaran 2024 sebesar sebesar Rp. 16.617.669.189,98 dengan realisasi mencapai Rp. 15.343.003.392 atau mencapai 92,33% dengan perincian :

##### **➤ Belanja pegawai**

Alokasi anggaran belanja pegawai tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 2.956.669.779 dengan realisasi mencapai Rp. 2.413.853.537, atau mencapai 81,64%

##### **➤ Belanja barang dan jasa**

Alokasi anggaran belanja barang dan jasa tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 13.660.999.411 dengan realisasi mencapai Rp. 12.929.149.855 atau mencapai 94,64%



## 2. Belanja Modal

Anggaran belanja modal dinas perikanan tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.594.812.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.531.359.929, atau mencapai 96,02%

program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 sebanyak 4 program, 8 kegiatan dan 14 subkegiatan dengan rincian capaian belanja langsung dari masing-masing program, kegiatan dan Sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.296.706.591	4.269.143.988	80,60
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.625.600	23.476.000	99,37
a.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.625.600	23.476.000	99,37
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.891.428.979	2.371.165.537	82,01
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.834.319.779	2.314.853.537	81,67
b.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	57.109.200	56.312.000	98,60
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.851.000	138.943.686	65,59
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.922.800	19.675.800	98,76
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.403.200	17.275.000	99,26
c.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.525.000	101.992.886	58,44
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.104.668.012	1.711.880.498	81,34
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.079.003.222	699.769.808	64,85
b.	Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.982.500	2.940.000	98,58
c.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.022.682.290	1.009.170.690	98,68



5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.133.000	23.678.277	36,35
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.186.700	22.893.277	37,42
	b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.946.300	785.000	19,89
II.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	10.725.031.499	10.591.739.194	98,76
	1. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	10.725.031.499	10.591.739.194	98,76
	a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	10.725.031.499	10.591.739.194	98,76
III.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	309.398.400	306.678.300	99,12
	1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	309.398.400	306.678.300	99,12
	a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	309.398.400	306.678.300	99,12
IV.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.881.344.700	1.706.801.829	90,72
	1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.881.344.700	1.706.801.829	90,72
	a. Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1.881.344.700	1.706.801.829	90,72
TOTAL		18.212.481.189,98	16.874.363.321	92,65

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.296.706.591 terealisasi sebesar Rp. 4.269.143.998 dengan tingkat pencapaian 80,60%

- a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.23.625.600 terealisasi sebesar Rp. 23.476.000 dengan tingkat pencapaian 99,37%



- Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD  
sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp.19.680.000 terealisasi sebesar Rp. 23.625.600 terealisasi sebesar Rp. 23.476.000 dengan tingkat pencapaian 99,37%. Hasil yang dicapai Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD selama 12 bulan.
- b. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah  
kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.2.891.428.979 terealisasi sebesar Rp. 2.371.165.537 dengan tingkat pencapaian 82,01%
- Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN  
sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.834.319.779 terealisasi sebesar Rp. 2.314.853.537 dengan tingkat pencapaian 81,67%. Hasil yang dicapai berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN Dinas Perikanan selama 12 bulan.
- Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD  
sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 57.109.200 terealisasi sebesar Rp. 56.312.000 dengan tingkat pencapaian 98,60%. Hasil yang dicapai berupa pembayaran honorarium pelaksana kegiatan pengelolaan keuangan dan lembur.



- c. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah  
kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 211.851.000 terealisasi sebesar Rp. 138.943.686 dengan tingkat pencapaian 65,59%
- Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  
sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 19.922.800 terealisasi sebesar Rp. 19.675.800 dengan tingkat pencapaian 98,76%. Capaian kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan alat tulis kantor dinas perikanan selama 12 bulan.
  - Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan  
sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 17.403.200 terealisasi sebesar Rp. 17.275.000 dengan tingkat pencapaian 99,26%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa cetak dan penggandaan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dinas perikanan.
  - Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD  
sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 174.525.000 terealisasi sebesar Rp. 101.992.886 dengan tingkat pencapaian 58,44%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa perjalanan dinas luar dan daerah dalam rangka pembinaan, koordinasi dan monitoring kegiatan perikanan.
- d. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah  
kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.104.668.012 terealisasi sebesar Rp. 1.711.880.498 dengan tingkat pencapaian 81,34%



- Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.079.003.222 terealisasi sebesar Rp. 669.769.808 dengan tingkat pencapaian 64,85%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembayaran rekening air, pembelian token listrik kantor dan pembayaran internet/Wi-Fi dinas perikanan.
  - Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Dengan alokasi dana Rp. 2.982.500 teralisasi sebesar Rp.2.940.000 dengan tingkat pencapaian 98,58%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaan alat dan barang kebersihan kantor.
  - Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.022.682.290 terealisasi sebesar Rp. 1.009.170.690 dengan tingkat pencapaian 98,68%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembayaran honorarium tenaga honorer sebanyak 40 orang.
- e. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.65.133.000 terealisasi sebesar Rp.23.678.277 dengan tingkat pencapaian 36,35%
- Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Alokasi dana sebesar Rp. 61.186.700 terealisasi sebesar Rp. 22.893.277 dengan tingkat pencapaian 37,42%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa belanja bahan bakar kendaraan dinas operasional, belanja suku cadang kendaraan dan belanja pajak kendaraan.



- Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya  
sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.946.300 terealisasi sebesar Rp. 785.000 dengan tingkat pencapaian 19,89%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pemeliharaan alat kantor berupa pemeliharaan AC, pemeliharaan komputer/laptop dan pemeliharaan printer.

## 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

program pengelolaan perikanan tangkap dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.725.031.49 terealisasi sebesar Rp. 10.591.739.194 dengan tingkat pencapaian 98,76%

### a. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.725.031.49 terealisasi sebesar Rp. 10.591.739.194 dengan tingkat pencapaian 98,76%.

- Sub kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil  
sub kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.725.031.49 terealisasi sebesar Rp. 10.591.739.194 dengan tingkat pencapaian 98,76%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap berupa pembangunan kapal perikanan, pengadaan mesin kapal, pengadaan alat tangkap

## 3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.881.344.700 terealisasi sebesar Rp. 1.706.801.829 dengan tingkat pencapaian 90,72%



a. kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah kab/kota

kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah kab/kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.881.344.700 terealisasi sebesar Rp. 1.706.801.829 dengan tingkat pencapaian 90,72%

- Sub kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.881.344.700 terealisasi sebesar Rp. 1.706.801.829 dengan tingkat pencapaian 90,72% Kegiatan yang dilaksanakan berupa biaya operasional kegiatan 3 pabrik es yakni pabrik es di TPI Alok, pabrik es di Nangahale dan pabrik es di Paga.

#### 4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

program pengelolaan perikanan budidaya dengan alokasi dana sebesar Rp. 309.398.400 terealisasi sebesar Rp. 306.678.300 dengan tingkat pencapaian 99,12%

##### a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

Kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil dengan alokasi dana sebesar Rp. 309.398.400 terealisasi sebesar Rp. 306.678.300 dengan tingkat pencapaian 99,12%

- Sub kegiatan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil  
Sub kegiatan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil dengan alokasi dana sebesar Rp. 309.398.400 terealisasi sebesar Rp. 306.678.300 dengan tingkat pencapaian 99,12%



## 2.2. Pelaksanaan Urusan Piihan

Dinas Perikanan sesuai dengan aturan melaksanakan urusan pilihan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaannya tugas pokoknya Dinas perikanan melakukan kegiatan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Gambaran umum kondisi perikanan Kabupaten Sikka sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

### 1. Produksi Perikanan

Produksi perikanan Kabupaten Sikka sangat tergantung kepada semua aktivitas nelayan yang didukung dengan program-program pemerintah maupun investasi sektor perikanan di Kabupaten Sikka. Perkembangan data produksi perikanan dapat ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2. Data Produksi perikanan Kabupaten Sikka :

No	Tahun	Produksi Penangkapan (Ton)	
		Target	Realisasi
		20.079,22	20.924,93
2.	2021	21.083,18	21.450,31
3.	2022	22.137,33	25.514,09
4.	2023	23.244,20	23.970,48
5.	2024	26.151,54	27.625,41

### 2. Rumah Tangga Perikanan

Rumah Tangga Perikanan (RTP) perikanan terdiri dari rumah tangga perikanan tangkap dan rumah tangga perikanan budidaya.



a. RTP Nelayan :

Rumah tangga perikanan tangkap sampai tahun 2024 masih mengacu dari hasil registrasi nelayan tahun 2015, dapat ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3. Rumah Tangga Perikanan (RTP) Kabupaten Sikka Tahun 2021

No	Status Nelayan	2024
1	Nelayan penuh	1.985
2	Nelayan Sambilan Utama	892
3	Nelayan Sambilan Tambahan	406
4	Buruh Nelayan	1.802
	<b>Jumlah</b>	<b>5.085</b>

b. Pembudidaya Ikan

Di tahun anggaran 2024 kegiatan budidaya berupa kegiatan pengadaan sarana prasarana budidaya ikan lele di Kecamatan Kangae, Kecamatan Waigete dan Kecamatan Kewapante.



### 3. Alat Tangkap

Tabel 2.4. Jenis alat tangkap di Kabupaten Sikka

No	Jenis Alat Tangkap	Unit	
		2023	2024
1	Pukat Pantai	644	644
2	Pukat Cincin /Purse seine	171	206
3	Jaring Insang Tetap	466	466
4	Jaring Insang Hanyut	991	991
5	Bagan	174	174
6	Longline	3	3
7	Rawai Dasar	92	92
8	Huhate / Pole and line	75	75
9	Pancing / Hand line	9.423	9.423
10	Bubu	179	179
11	Panah	913	913
12	Jala Tebar	166	215

### 4. Armada Perikanan

Tabel 2.5. Armada perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2024

NO	Armada Perikanan	2023 (unit)	2024 (unit)
1	Jukung	50	50
2	Perahu Papan Kecil/sampan fiberglass <5m	307	332
3	Perahu Papan Sedang/sampan fiberglass >5m	255	255
4	Perahu Papan Besar	0	0
5	Motor Tempel < 5 GT	88	157
6	Motor Tempel 5-10 GT	0	0
7	Motor Tempel 10-20 GT	0	0
8	Kapal Motor < 5 GT	452	513
9	Kapal Motor 5-10 GT	102	102
10	Kapal Motor 10-20 GT	8	8
11	Kapal Motor 20-30 GT	67	67
12	Kapal Motor 30-50 GT	1	1



## 5. Konsumsi ikan

Tabel 2.6. Data konsumsi ikan penduduk Kabupaten Sikka

No	Tahun	Konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun)	
		Target	Capaian
1.	2019	52,50	59,19
2.	2020	53,45	61,73
3.	2021	54,75	62,54
4.	2022	55,25	74,74
5.	2023	56,25	70,15
6.	2024	76,61	79,57

## 6. Pendapatan Nelayan

Tabel 2.7. Data Pendapatan Nelayan Kabupaten Sikka

No.	Tahun	Pendapatan Nelayan (Rp.)	
		Target	Capaian
1..	2020	13.450.000	14.749.000
2.	2021	14.750.000	14.775.744
3.	2022	15.500.000	19.083.980
4.	2023	16.250.000	14.157.940
5.	2024	19.561.082	20.138.456,68

## 8. Nilai PDRB

Tabel 2.8. Nilai PDRB Tiga Tahun Terakhir

No.	Tahun	Nilai PDRB
1.	2020	11,83
2.	2021	11,36
3.	2022	11,74
4.	2023	10,31
5.	2024	11,31



### 2.3. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Kebijakan strategis yang dilakukan Dinas Perikanan didasarkan pada Renstra Dinas Perikanan 2024-2026, antara lain :

1. Memanfaatkan regulasi dibidang perikanan untuk meningkatkan pengelolaan SDI, ketrampilan pelaku utama dan pelaku usaha, memperluas peluang pasar serta pemanfaatan teknologi perikanan dan meningkatkan investasi serta mencegah ilegal fishing.
2. Memanfaatkan Grand design bidang perikanan untuk pengembangan potensi SDI, peningkatan produksi perikanan dan investasi bidang perikanan.
3. Memanfaatkan data base perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan.
4. Meningkatkan SDM aparatur dan pengembangan perikanan terpadu serta peningkatan sarana dan prasarana dibidang perikanan melalui program untuk mencegah ilegal fishing, Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum disektor perikanan untuk mencegah ilegal fishing.
5. Mengembangkan perikanan terpadu untuk menarik minat investasi di bidang perikanan.
6. Meningkatkan kemitraan, koordinasi dan komunikasi antar lembaga/instansi, penguatan teknoigi perikanan untuk memanfaatkan potensi SDI dan peluang pasar, mencegah konflik kepentingan SDI.



## 2.4. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2023

Tabel 2.9. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Agar pemerintah terus berusaha untuk mencari investor sehingga dapat meningkatkan PAD dan menyerap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Sikka	Dinas Perikanan tetap menjalin kemitraan dengan perusahaan yang bergerak di bidang perikanan	Untuk peningkatan PAD melalui sewa fasilitas sarana perikanan
2.	Agar pemerintah perlu menganggarkan pembangunan pabrik es di Ipir Kecamatan Bola untuk memenuhi kebutuhan es bagi para nelayan di wilayah selatan Kabupaten Sikka	Dinas Perikanan telah menganggarkan di tahun 2025 namun karena keterbatasan anggaran maka kegiatan tersebut ditangguhkan dan akan diupayakan di anggarkan di tahun berikutnya	Untuk pelayanan kebutuhan es oleh nelayan dengan mengoptimalkan pabrik es di wilayah Nangahale dan paga sehingga daerah wilayah selatan dapat terpenuhi
3.	Agar pemerintah segera memperbaiki seluruh fasilitas procecing pengolahan ikan yang sedang rusak	Dinas perikanan mendapatkan alokasi dana khusus (DAK) 2024 untuk memperbaiki fasilitas	Untuk meningkatkan PAD melalui pembelian produk es balok untuk pengolahan dan pemasaran hasil ikan



		pendukung kegiatan pengolahan di pabrik es dan cold storage	
--	--	---	--

## 2.5. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten

Tabel 2.10.  
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	12,03	11,31	94,01%
2.	Produksi perikanan	Ton	26.151,54	27.625,41	105,64%
3.	Nilai Produksi Perikanan	Rupiah	397.872.397.825	409.616.208.936,36	102,95%
4.	Pendapatan Nelayan	Rupiah	19.561.082	20.138.456,68	102,95%
5.	Tingkat konsumsi ikan	Kg / kapita / tahun	76,61	79,57	103,86%
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	2,70	3,69	136,67%
7.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	75	92,01	122,68%
8.	Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan publik	Indeks	1,25	0,85	68%

Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB terealisasi sebesar 11,31 dari target 12,03 sehingga perbandingan capaiannya 94,01%. Produksi perikanan terealisasi 27.625,41 ton dari target 26.151,54 ton dengan perbandingan capaian 105,64%. Nilai produksi perikanan terealisasi sebesar Rp.409.616.208.936,36 dari target sebesar Rp.397.872.397.825 sehingga angka perbandingan capaian menjadi 102,95%. Pendapatan nelayan dengan target sebesar Rp.19.561.082 dan terealisasi sebesar Rp. 20.138.456,68 dengan angka perbandingan capaian 102,95%. Tingkat konsumsi ikan terealisasi 79,57 melebihi target



## **BAB III**

# **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

### **3.1. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas-Pembantuan**

Dinas Perikanan di Tahun 2024 mendapatkan Dana Alokasi Khusus ( DAK) sebesar Rp. 4.497.164.750 yang terbagi menjadi 2 kegiatan yakni kegiatan Fisik sebesar Rp. 4.272.390.000 dan kegiatan penunjang sebesar Rp. 224.774.750. untuk kegiatan fisik terbagi menjadi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan. Sedangkan kegiatan penunjang berupa Jasa konsultan, kegiatan monitoring dan biaya tender.

Namun pagu Alokasi Dana Khusus hasil dari berkontrak sebesar Rp. 4.384.741.689. Dalam pelaksanaannya Dak disalurkan secara bertahap. Tahap I sebesar Rp. 959.943.687, tahap 2 sebesar Rp. 1.727.898.638, tahap 3 sebesar Rp. 1.048.523.364, tahap sekaligus-rekomendasi sebesar Rp. 648.376.000. Realisasi Dana Alokasi Khusus tahun 2024 bidang kelautan dan perikanan sebesar Rp. 4.354.949.689 dengan capaian 99,32%

### **3.2. Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian**

Dalam pelaksanaan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus mengalami hambatan yakni keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah pusat sehingga berakibat pada proses pencairan dana untuk pengadaan barang dan jasa. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan komunikasi dengan pihak yang berkontrak untuk tetap melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati.



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB terealisasi sebesar 11,31 dari target 12,03 sehingga perbandingan capaiannya 94,01%.
2. Produksi perikanan dengan target 26.151,54 ton dan terealisasi 27.625,41 ton dengan perbandingan capaian 105,64%.
3. Nilai produksi perikanan terealisasi sebesar Rp. 409.616.208.936,36 dari target sebesar Rp. 397.872.397.825 sehingga angka perbandingan capaian menjadi 102,95%.
4. Pendapatan Nelayan dengan target sebesar Rp. 19.561.082 dan terealisasi sebesar Rp. 20.138.456,68 dengan angka perbandingan capaian 102,95%.
5. Tingkat konsumsi ikan terealisasi 79,57 melebihi target 76,61 dengan angka perbandingan capaian 103,86%.
6. Indeks kepuasan masyarakat dengan target 2,70 dan terealisasi 3,69 lebih rendah dari target dengan perbandingan capaian 136,67%
7. Indeks profesionalitas ASN target 75 terealisasi 92,01 dengan angka perbandingan capaian 122,68%.
8. Indeks sarana dan prasarana terealisasi 0,85 dari target 1,25 dengan angka perbandingan capaian 68%.
9. Target pendapatan tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 3.000.000.000 dengan capaian realisasi Rp. 1.215.123.180 dengan capaian 40,50 %



10. Alokasi anggaran belanja tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 18.212.481.189,98 dengan realisasi mencapai Rp. 16.874.363.321 atau mencapai 92,65%.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diajukan adalah :

1. Peningkatan indeks sarana dan prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan.
2. Pengadaan mesin pabrik es yang baru untuk mengganti mesin pabrik es lama sehingga berpengaruh pada penerimaan pendapatan asli daerah.
3. Perlu peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di sektor perikanan terutama untuk pelatihan teknis penangkapan, pengolahan dan budidaya ikan.

Maumere, 21 Januari 2025



Kepala Dinas Perikanan,  
Kabupaten Sikka,

Paulus Hilarius Bangkur, S.Pi, M.Pi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660628 199703 1 005